

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi dapat dipahami sebagai interaksi yang kompleks dan dinamis antara bisnis dan masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki kewajiban yang mendasar untuk menghormati dan mematuhi perjanjian serta aturan yang berlaku di masyarakat saat menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini sejalan dengan penekanan yang diberikan oleh teori legitimasi yang dikemukakan oleh Fernando dan Lawrence (2014), yang menegaskan bahwa keberadaan dan kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada penerimaan dan dukungan dari masyarakat. Tanpa legitimasi sosial, perusahaan berisiko kehilangan akses ke sumber daya dan pasar yang vital bagi keberlangsungan operasionalnya.

Menurut Putra dan Utami (2017), teori legitimasi menggambarkan suatu keadaan psikologis dimana individu atau kelompok cenderung berpihak pada suatu hal berdasarkan kepekaannya terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Sensitivitas tersebut tidak hanya mencakup aspek fisik seperti kondisi alam dan struktural, namun juga aspek non fisik seperti norma sosial, nilai budaya, dan kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks ini, mereka secara alami menjadi lebih peka terhadap perubahan lingkungan baik langsung maupun tidak langsung, dan hal ini memengaruhi pandangan mereka terhadap legitimasi tindakan dan kebijakan.

Menurut teori legitimasi, setiap industri yang menjalankan kegiatan operasionalnya akan selalu berada dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya, di mana perusahaan dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh lingkungan tersebut (Maharani 2025). (Supadi dan Sudana, 2018) juga menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara nilai-nilai perusahaan dengan norma yang berlaku di masyarakat dapat menimbulkan ancaman bagi kelangsungan perusahaan.

Perusahaan dapat menunjukkan tanggung jawabnya kepada masyarakat sekitar dengan secara sukarela mengungkapkan informasi terkait emisi karbon melalui laporan khusus, seperti laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*), laporan tahunan, atau informasi yang disediakan di situs web perusahaan. Pengungkapan ini bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami bahwa perusahaan telah menerapkan nilai-nilai yang relevan, sehingga legitimasi perusahaan tetap terjaga (et al. 2019). Ketika keberadaan suatu perusahaan selaras dengan kondisi dan nilai-nilai masyarakat sekitar, maka legitimasi perusahaan terhadap nilai-nilai tersebut akan semakin meningkat (Djuitaningsih & Ristiawati, 2015).

Legitimasi merupakan aspek penting yang diharapkan oleh setiap perusahaan. Dengan menjadikan legitimasi sebagai dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat terkait aktivitas bisnis yang dijalankan, sehingga operasional perusahaan dapat berlangsung dengan lancar tanpa menimbulkan konflik di masyarakat maupun di area operasional. Selain itu, legitimasi juga membantu perusahaan dalam meningkatkan reputasinya, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan. Namun, tujuan utama dari memperoleh legitimasi tetaplah untuk mencapai keuntungan maksimal dalam kegiatan bisnis perusahaan.

Teori legitimasi ini didasarkan pada adanya kesepakatan sosial yang terbentuk antara entitas perusahaan dan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Ghozali dan Chariri (2014: 442). Kesepakatan sosial ini mencakup pemahaman dan ekspektasi yang saling menguntungkan antara kedua pihak, di mana perusahaan diharapkan untuk beroperasi dengan cara yang sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan bukan hanya sekadar entitas yang berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga bertindak sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

2.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam

pembangunan dunia. Sebuah dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*—berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030—disepakati oleh 193 kepala negara dan pemerintahan dari seluruh dunia. Dokumen ini juga dikenal sebagai *Sustainable Development Goals*, atau SDGs. versi awal yang cukup sukses dengan delapan tujuan. SDGs jauh lebih luas daripada MDGs, dan akan meneruskan prioritas pembangunan seperti penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas. SDGs juga memiliki tujuan untuk membuat masyarakat lebih aman dan inklusif. (Panuluh, Fitri 2016)

SDGs adalah agenda pembangunan global yang bertujuan untuk memperbaiki permasalahan di bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum dan tata kelola untuk menjamin kualitas hidup manusia secara berkelanjutan (Wicaksono, 2023). *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah singkatan dari "tujuan pembangunan berkelanjutan", yang merupakan dokumen yang akan digunakan sebagai dasar untuk perundingan dan pembangunan antar negara di seluruh dunia (Wahyuningsih, 2018).

SDGs dibuat dengan 17 tujuan global untuk meningkatkan dan melanjutkan kualitas hidup masyarakat. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai dalam 15 tahun, mulai dari tahun 2016–2030 (Bebbington & Unerman, 2018). Di antara tujuan global tersebut diantaranya:

1. Tidak ada kemiskinan. Dunia harus bebas dari kemiskinan.
2. Tidak ada kelaparan. Mencegah kelaparan, ketahanan pangan, peningkatan nutrisi, mempertahankan pertanian berkelanjutan.
3. Kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Layanan Kesehatan yang memadai diberikan kepada setiap anggota masyarakat, tanpa memandang usia mereka atau tingkat kesejahteraan hidup mereka.

4. Pendidikan berkualitas. Memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam dunia Pendidikan dan menjamin Pendidikan yang berkualitas tinggi.
5. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender di sini bukan hanya tentang hak asasi manusia yang mendasar, namun juga pondasi yang diperlukan untuk dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan.
6. Air bersih dan sanitasi layak. Memastikan semua orang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.
7. Energi bersih dan terjangkau. Sumber energi modern, terjangkau, terpercaya, dan berkelanjutan tersedia untuk semua orang.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi semakin pesat dan lapangan kerja tersedia untuk semua orang sehingga mampu mendapatkan kehidupan yang layak.
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Industri dan infrastruktur berkembang dengan cepat, menjadi kualitas tinggi, penuh inovasi, dan berkelanjutan.
10. Berkurangnya kesenjangan. Realisasi kesetaraan global.
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan. Membangun pemukiman dan kota-kota yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Keberlangsungan konsumsi serta pola produksi terjamin.
13. Penanganan perubahan iklim. Melakukan Tindakan cepat untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
14. Ekosistem lautan. Menjaga kelestarian laut dan eksistensi sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem daratan. Mengelola dan memperhatikan kelestarian hutan, memulihkan degradasi tanah, dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dalam ekosistem darat.
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Untuk menciptakan perdamaian di masyarakat, memastikan bahwa keadilan tersedia untuk semua orang dan Lembaga tanpa diskriminasi, dan untuk membangun institusi yang efisien, bertanggung jawab, dan terbuka untuk semua orang.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Memperkuat pelaksanaan dan menghidupkan Kembali Kerjasama global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Agenda pembangunan global yang dikenal sebagai SDGs bertujuan untuk memperbaiki masalah sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum, dan tata kelola untuk menjamin kualitas hidup manusia yang berkelanjutan (Wicaksono, 2023). Tujuan SDGs Untuk mengatasi tantangan paling mendesak di dunia, seperti mengakhiri kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi, inklusi sosial, kelestarian lingkungan, perdamaian, dan tata kelola yang baik untuk semua negara dan semua orang pada tahun 2030, Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Ramadhani & Prihantoro, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Goals dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai inisiatif dan program untuk memastikan implementasi SDGs dengan baik. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri masalah seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, kesehatan, pengangguran, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menerapkan dan mencapai SDGs (Pangestu dkk., 2021).

Dengan fokus pada perdamaian dan tata kelola yang baik, SDGs mendorong negara-negara untuk membangun institusi yang kuat, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan layanan publik yang efektif dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pencapaian SDGs tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk bersama-sama menciptakan perubahan positif. Dari perspektif perusahaan, terutama yang bergerak di sektor pertambangan, adopsi prinsip-prinsip SDGs menjadi semakin penting, mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh

aktivitas mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan tujuan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing dan reputasi mereka di pasar global. Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat terhadap SDGs, diharapkan semua negara dan semua orang dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2030 (Ramadhani & Prihantoro, 2020).

Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mencakup banyak bidang seperti kewilayahan, ekonomi, dan sosial, serta berprinsip memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa depan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah terpeliharanya kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan saat ini dan di masa depan (Brealiastiti, 2021).

Penerapan *Sustainable Development Goals* pada perusahaan-perusahaan mulai dilakukan dalam rangka mengungkapkan kepada stakeholder mengenai aktivitas bisnis yang mengarah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. SDGs diterapkan pada perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap isu lingkungan dan sosial terkini. Penerapan tujuan SDGs dalam perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan tujuantujuan dalam SDGs mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Kontribusi perusahaan terhadap SDGs tidak hanya berfokus pada kegiatan tanggung jawab sosial saja, namun perusahaan berharap cost yang telah dikeluarkan untuk mengungkapkan indikator ekonomi dalam *Sustainable Development Goals* dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Tristiarto, Wahyudi, and Sugianto., 2024)

2.3 Carbon Emission Disclosure

Aktivitas perusahaan sekarang harus lebih terbuka. Dalam laporan tahunannya, perusahaan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang

diungkapkan dalam laporan tahunan terbagi menjadi dua kategori yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. Perusahaan biasanya akan memberikan informasi jika itu akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, jika informasi itu dapat membahayakan posisi atau reputasi perusahaan, perusahaan akan menahan informasi tersebut.

Definisi emisi karbon merupakan terlepasnya berbagai macam gas yang terdapat karbon ke atmosfer. Contoh dari pengungkapan lingkungan adalah *Carbon Emission Disclosure* (CED). *Carbon Emission* adalah proses pelepasan karbon dioksida ke atmosfer bumi sebagai akibat dari aktivitas pembakaran energi tidak terbarukan. (Nadine., 2018). Perusahaan menunjukkan kepeduliannya terhadap pelestarian lingkungan dengan mengumumkan emisi karbon. Pengungkapan ini dimasukkan ke dalam CSR, yang berasal dari laporan keberlanjutan perusahaan.

Salah satu jenis pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah emisi gas karbon, yang dapat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Proses pembakaran karbon, baik dalam bentuk tunggal maupun senyawa, menyebabkan pelepasan gas ini. Di tingkat lokal, regional, nasional, dan global, emisi karbon terus meningkat. (Pratama and Permatasari 2024) mengatakan bahwa berdasarkan sumbernya, emisi karbon atau gas rumah kaca dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu gas rumah kaca industri dan gas rumah kaca alami.

Kegiatan perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang emisi karbon saat ini, sehingga emisi karbon mempengaruhi atmosfer, dimana perubahan iklim berubah ubah dengan cepat. (*International Energy Agency* (IEA)., 2023). kegiatan pertambangan tetap berdampak besar pada lingkungan, termasuk emisi karbon. Pertambangan bahan bakar fosil tetap menjadi sumber utama emisi karbon yang signifikan, sehingga pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan menjadi krusial untuk mencapai tujuan keberlanjutan seperti yang diatur dalam SDGs. Kebutuhan akan transparansi dalam pelaporan emisi karbon menjadi semakin penting dalam konteks perubahan iklim yang cepat. Dengan adanya kebijakan dan regulasi yang semakin ketat terkait pengungkapan emisi karbon, perusahaan

tambang diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola dampak lingkungan mereka.

Carbon Emission Disclosure merupakan salah satu contoh pengungkapan lingkungan yang termasuk dalam laporan tambahan yang telah disetujui oleh undang-undang (Wirawan and Setijaningsih 2022). Pengungkapan emisi karbon adalah pengungkapan sukarela tentang emisi karbon yang dihasilkan oleh proses produksi perusahaan. Menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Proyek *Carbon Disclosure Project* (CDP), banyak item dalam Daftar Pengungkapan Emisi Karbon dapat ditemukan. Pengungkapan dalam CDP dibagi dalam 5 kelompok besar yaitu: risiko dan peluang perubahan iklim (CC/*Climate Change*), emisi gas rumah kaca (GHG/*Greenhouse Gass*), konsumsi energi (EC/*Energy Consumption*), pengurangan gas rumah kaca dan biaya (RC/*Reduction and Cost*), serta akuntabilitas emisi karbon (AEC/*Accountability of Emission Carbon*). Dalam lima kategori tersebut, terdapat 18 item yang diidentifikasi.

Carbon emission disclosure adalah salah satu jenis pengungkapan lingkungan yang dapat ditemukan dalam laporan tambahan dan dinyatakan dalam PSAK. Secara umum, perusahaan akan memberikan informasi jika dapat meningkatkan nilai perusahaan, tetapi jika tidak menguntungkan, perusahaan akan menahan informasi tersebut. Oleh karena itu, kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan diterapkan. Indeks pengungkapan yang dibuat oleh (Choi al dkk. 2013) digunakan untuk menghitung emisi karbon.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang *Carbon Emission Disclosure* terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* telah banyak diteliti oleh peneliti lain, maka diantaranya yang dapat dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
11	Ersi Sisdianto, Rahmat Fajar Ramdani (2024)	Pengaruh <i>Carbon Emission Disclosure</i> terhadap <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	<i>Carbon Emission Disclosure</i> (x), <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) (y)	<i>Carbon Emission Disclosure</i> memiliki dampak parsial terhadap <i>Sustainable Development Goals</i> . dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel X secara simultan berpengaruh terhadap <i>Sustainable Development Goals</i> .
22	Jhody Wiraputra, Supaijo, Ersi Sisdianto (2024)	<i>The Influence of The Global Reporting Initiative, Sustainability</i>	<i>Global Reporting Initiative</i> (x1), <i>Sustainability</i>	Pengungkapan emisi karbon

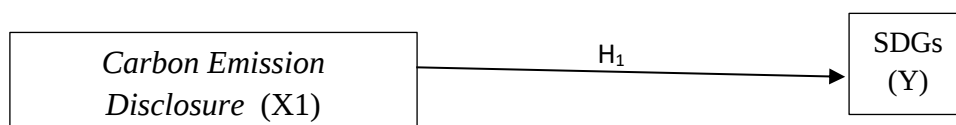
		<i>Accounting Standard Board and Carbon Emission Disclosure on the Sustainable Development Goals in Southeast Asia in the Islamic Perspective in 2021 And 2022</i>	<i>Accounting Standard Board (x2, Carbon Emission Disclosure x3, Sustainable Development Goals (y)</i>	berpengaruh positif terhadap pembangunan berkelanjutan perusahaan.
3.	Jhody Wiraputra (2024)	<i>Pengaruh Global Reporting Intiative, Sustainability Accounting Standard Board Dan Carbon Emission Disclosure Terhadap Sustainable Development Goals Pada Kawasan Asia Tenggara Dalam Perspektif Islam Tahun 2021 dan 2022</i>	<i>Global Reporting Intiative (x1), Sustainability Accounting Standard Board (x2), Carbon Emission Disclosure (x3), Sustainable Development Goals (SDGs) (y)</i>	Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa <i>Carbon Emission Disclosure</i> (CDP) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.009. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3

				diterima yang bisa diartikan variabel <i>"Carbon Emission Disclosure (CDP) berpengaruh Sustainable Development Goals (SDGs)"</i> .
4	Relin Kurniawan, Vika Fitranita (2024)	<i>The Effect Of Green Accounting, Enviromental Perfomance, and Enviromental Disclosure on Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	<i>Green Accounting Enviromental Perfomance (x1), Enviromental Disclosure (x2), Sustainable Development Goals (SDFGs) (y)</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengungkapan Lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> . Semakin banyak Perusahaan menerapkan

				Pengungkapan Lingkungan, semakin membantu dalam mewujudkan SDGs.
5.	Tabah Rizki, Andrianto Widjaja, Dewi Shanty (2023)	<i>Carbon Disclosure and SDGs Performance: adoption of green innovation in Indonesia</i>	<i>Carbon Disclosure</i> (x1), <i>Green Innovation</i> (x2), <i>SDGs Performance</i> (y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Carbon Disclosure</i> (CD) dan <i>Green Innovation</i> (GI) dapat meningkatkan kinerja SDGs secara signifikan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Carbon Emission Disclosure dapat berarti pengungkapan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengungkapkan atau mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilakukannya terhadap lingkungan. Dalam konteks bisnis dan pembangunan berkelanjutan, pengungkapan emisi karbon memiliki manfaat yang signifikan karena akan menciptakan transparansi dalam kegiatan bisnis dan menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan. Pengungkapan emisi karbon akan memungkinkan organisasi untuk memahami bagaimana kegiatan operasional mereka berdampak pada lingkungan. Ada kemungkinan bahwa informasi yang diperoleh dari pengungkapan emisi karbon akan membantu organisasi dalam membuat rencana yang berfokus pada keberlanjutan. Pengungkapan emisi karbon juga dapat membantu mengelola sumber daya yang lebih efisien, seperti energi, air, dan bahan baku. Proses pengungkapan emisi karbon seringkali melibatkan evaluasi efisiensi energi dan menemukan peluang untuk inovasi teknologi yang ramah lingkungan.

Carbon Emission Disclosure, juga dikenal sebagai pengungkapan emisi karbon, adalah penjabaran informasi tentang upaya perusahaan untuk mengurangi emisi karbon, seperti biaya lingkungan yang dikeluarkan, perhitungan energi yang dikeluarkan, dan peraturan perusahaan dan penggunaan energi. Pengungkapan emisi karbon dapat digunakan oleh bisnis untuk berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca (Ma and Setiawan n.d.). Pengungkapan emisi karbon merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi tuntutan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

H_1 : *Carbon Emission Disclosure* berpengaruh dan signifikan terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)*